



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING DI LABUAN BAJO

Puteri Hikmawati

Analisis Legislatif Ahli Utama

puteri.hikmawati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Perairan Labuan Bajo hingga Taman Nasional Komodo menjadi destinasi favorit wisatawan untuk kegiatan *diving* (menyelam). Kegiatan *diving* ini banyak diminati wisatawan mancanegara. Warga negara asing (WNA) tersebut ada yang menjadi *dive master* (instruktur selam) setelah melalui kursus (*training*). WNA juga mengantongi visa untuk *training*, bukan kerja, sebagaimana diungkapkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, Charles Christian Mathaus. Menurutnya, banyaknya WNA yang menjalani *training dive master* di Labuan Bajo, memberikan manfaat ekonomi bagi daerah setempat.

Pada periode Januari–24 November 2025 terdapat 1.718 WNA yang mengajukan permohonan izin tinggal di Labuan Bajo. WNA tersebut marak menginap di kamar kos, bukan hotel dan terkait dengan *training* karena IMTA (izin mempekerjakan tenaga kerja asing) dari *dive master training* hingga 1–3 bulan. Charles menegaskan tak ada larangan WNA menginap di kos sepanjang WNA membayar sewa kos tersebut. WNA dapat dilarang menginap di kos jika di suatu daerah ada aturan yang melarangnya.

Kantor Imigrasi belum mempunyai data jumlah WNA yang menginap di kos di Labuan Bajo. Pihaknya masih melakukan pendataan. Saat ini Kantor Imigrasi sedang melakukan sosialisasi aplikasi pelaporan orang asing (APOA) kepada pemilik kos dan *homestay* agar mereka melaporkan WNA yang menginap. Selama ini hanya pelaku usaha hotel yang melaporkan WNA yang menginap. Pemberian laporan tidak perlu datang langsung (ke Kantor Imigrasi), cukup melalui APOA. Jasa penginapan didorong agar melakukan pelaporan orang asing melalui APOA. Adapun data pelaporan orang asing sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 61.694 orang asing. APOA merupakan platform digital yang memudahkan pengelola hotel atau tempat penginapan dalam melaporkan keberadaan orang asing yang menginap. Data ini juga dibutuhkan untuk mengetahui pola dan perilaku orang asing serta sebagai bahan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan pariwisata.

Kantor Imigrasi Labuan Bajo mencatat sepanjang tahun 2025 jumlah pergerakan perlintasan WNA serta WNI dari dan ke luar Labuan Bajo terus mengalami peningkatan karena perkembangan sektor pariwisata dan terdapat rute penerbangan internasional. Tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) udara di Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo, sepanjang tahun 2025 mencatat total kedatangan sebanyak 25.258 orang dan keberangkatan sebanyak 24.889 orang. Sementara itu, untuk TPI laut terbesar dari kapal pesiar dan *yacht* dengan jumlah kedatangan sebanyak 19.837 orang dan keberangkatan 7.761 orang, yang rata-rata orang asing.

Sepanjang tahun 2025, Tim Pengawasan Orang Asing Bersama (Timpora) telah melaksanakan lima operasi di empat kabupaten yakni Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada. Tahun ini juga Timpora telah melakukan empat kali operasi gabungan dan 28 operasi mandiri untuk memastikan keberadaan dan aktivitas wisatawan sesuai aturan keimigrasian. Sementara itu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT)

meningkatkan pengawasan laut melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mencegah pelanggaran keimigrasian para wisatawan yang berkunjung. Menurut Charles, pelaksanaan pengawasan ini juga menggandeng instansi-instansi dan aparat penegak hukum terkait dalam menjaga keamanan wilayah perairan laut, seperti TNI-Polri, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) hingga otoritas pariwisata. Pengawasan perairan dilakukan guna memperkuat pengawasan terhadap potensi pelanggaran keimigrasian yang dapat terjadi di wilayah perairan, terutama terkait penyalahgunaan izin tinggal, keluar-masuk kapal asing, serta aktivitas wisatawan asing yang menggunakan jalur laut.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli Siahaan, menyoroti pentingnya penguatan sistem pengawasan dan sumber daya manusia di daerah tujuan wisata strategis, seperti Labuan Bajo, NTT. Hal itu khususnya dalam menghadapi tantangan yang berkaitan dengan tingginya mobilitas orang, perdagangan orang, dan keterbatasan kapasitas lembaga hukum di daerah.

Atensi DPR

Peningkatan kunjungan WNA ke Labuan Bajo telah direspons oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo dengan memperketat pengawasan terhadap para WNA. Salah satu langkahnya adalah menggelar operasi gabungan di sejumlah hotel dan penginapan di Labuan Bajo. Di satu sisi peningkatan jumlah wisatawan di Labuan Bajo dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, namun di sisi lain berpotensi terjadi pelanggaran keimigrasian di wilayah perairan, terutama terkait penyalahgunaan izin tinggal, keluar-masuk kapal asing, serta aktivitas wisatawan asing yang menggunakan jalur laut.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi XIII DPR RI perlu mendukung Keimigrasian memperketat pengawasan terhadap WNA, agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran. Komisi XIII DPR RI juga mendukung kolaborasi pelaksanaan pengawasan ini dengan instansi-instansi dan aparat penegak hukum terkait dalam menjaga keamanan wilayah perairan laut, seperti TNI-Polri, KSOP hingga otoritas pariwisata.

Sumber

antaranews.com, 27 November 2025;
detik.com/bali, 10 Mei 2025 dan 25 November 2025;
dpr.go.id, 26 Juli 2025; dan
news.republika.co.id, 27 November 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*